

ABSTRAK

Luvi Wulandari: Implementasi PERDA Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ditinjau Melalui Siyasah Dusturiyah.

Dalam upaya untuk menyelesaikan urusan pemerintah maka pemerintah pusat dibantu dengan adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan urusan rakyat. Permasalahan perlindungan anak menjadi masalah *trend* dengan ditemukannya berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya maka Pemerintah kota Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi peraturan daerah perlindungan anak di kota Tasikmalaya dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya pelaksanaan perda serta bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap upaya pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Melalui konsep siyasah dusturiyah tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi tercapainya tujuan bersama yang mengandung prinsip melindungi nyawa (*an-nafsh*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi keturunan (*hifzh an-nashl*).

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni menggambarkan data yang ada di lapangan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah undang – undang, perda, perwalkot, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Daerah dan DPPKBPPA Kota Tasikmalaya. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan, buku - buku dan tulisan - tulisan ilmiah terkait objek penelitian. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan dan data lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak di kota Tasikmalaya belum efektif, penyebab dari belum optimalnya pelaksanaan perda ini diantaranya, pertumbuhan masyarakat yang kian meningkat, sarana penunjang pelaksanaan perlindungan anak yang kurang memadai, APBD yang kurang dalam berbagai program, kurangnya sumber daya pegawai yang berdedikasi serta perilaku masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah berupaya dengan melakukan komitmen dengan melakukan sosialisai dan program. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah perda kota tasikmalaya adalah produk kekuasaan yang melahirkan masalahat *dharuriyat* sejalan yang mengandung prinsip melindungi nyawa (*an-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi keturunan (*hifzh an-nashl*).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG